

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abd.Rahman dan Baso Madiung, 2016, *Politik Hukum Pertanahan*, Bosowa Publishing Group, Sulawesi Selatan.
- Algra, N.E., 1951, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Tweede Druk, J.B. Wolter' Uitgevers-maatshappij N.V., Groningen.
- A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang Cetakan ke I*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah Cetakan ke I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung.
- Bernhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Rafi Maju Mandiri, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary, Revised 4 edition*, West Publishing CO, St. Paul Minn, USA.
- Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Boer Mauna, 2001, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Dina Sunyowati dan Enny Narwati, 2013, *Buku Ajar Hukum Laut Cetakan ke I*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya.
- Gunanegara, 2017, *Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.
- Imam Soetikno, 1994, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Irene Eka Sihombing, 2017, *Segi-segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Marihot Pahala Siahaan, 2008, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- Mertokusumo dan Iswanto, 1988, *Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Karunika, Jakarta.
- Mochtar Koesoemaatmadja, 1997, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung.
- , 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Nicolai, P., 1994, et.al, *Bestuursrect*, Amsterdam.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Renhard F. Manurung, 2015, *Teknik Pantai, Survey Kerusakan Pantai Serangan Bali*, Academic.Edu, Bali.
- Ridwan Halim, 2014, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi Cetakan ke XI*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Cetakan ke V*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke III*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Stout, H.D., 1994, *De Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kristische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*, W.E.J. Tjeenk Willink – Zwolle.
- Sudarto Gautama, 1997, *Tafsiran Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960) dan Peraturan Pelaksanaannya (1996) Cetakan ke X*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Supriadi, 2018, *Hukum Agraria Cetakan ke VIII*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta.

Urip Santoso, 2015, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Cetakan ke V*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Lembaran Negara Nomor 294 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657 Tahun 2015.

Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanahan versi Agustus 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643 Tahun 1996.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Nomor 246 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Nomor 83 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Nomor 21 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5262 Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional. Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bangunan dan Instalasi di Laut. Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6459 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Lembaran Negara Nomor 276 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/Permen-KP/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 758 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1433 Tahun 2019.

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2013.

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Berau. Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2014.

## **ARTIKEL JURNAL**

Fila Delfia, *Pelaksanaan Kepemilikan Rumah Panggung Sebagai Rumah Tinggal di Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna*, E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

Hariansi Panimba Sampebulu, *Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Bali*, Mimbar Keadilan, Vol. 12, Nomor 2, Agustus 2019 – Januari 2020.

Jenny K. Matuankotta, *Hak Pengelolaan Atas Tanah-Tanah Adat di Maluku*, <https://fhukum.unpatti.ac.id/lingkungan-hidup->

pengelolaan-sda-dan-perlindungan-hak-hak-adat/263-hak-pengelolaan-atas-tanah-tanah-adat-di-maluku#\_ftn1, diakses 22 Maret 2020.

Reza Adrian Setyada Tag, *Problematika Pendirian Bangunan di Atas Air*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, Nomor 1, 2019.

#### **ARTIKEL MAJALAH**

Eman Ramelan, *Hak Pengelolaan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999*, Majalah Yuridika, Vol. 15 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Mei-Juni 2000.

#### **MAKALAH YANG DIBAWAKAN DI PERTEMUAN ILMIAH**

Aca Sugandy, *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan Sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan*, Makalah Pada Konferensi PSL VIII, Sulawesi Selatan, 1987.

A.M. Yunus Wahid, *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Bukan Pertanian Sebagai Fenomena Tata Ruang*, Makalah Lingkungan dan Tata Ruang, PPS UGM Yogyakarta, 1987.

Bagir Manan, *Peranan Hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah Pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang, 1996.

-----, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000.

-----, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUD 1945*, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995.

Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.

## ONLINE INFORMATION VIA INTERNET

Antaraneews.com, *Garis Pantai Indonesia Terpanjang Kedua di Dunia*, <https://www.antaraneews.com/berita/487732/garis-pantai-indonesia-terpanjang-kedua-di-dunia>, diakses 11 September 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id), diakses 17 Maret 2020.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Kunci Pengembangan Pariwisata Ada Di Pemerintah Daerah*, <http://www.kemenpar.go.id/post/kunci-pengembangan-pariwisata-ada-di-pemerintah-daerah>, diakses 4 November 2019.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *Studi Penyusunan Rencana Operasional Pengembangan 3A Di KSPN Derawan-Sangkalaki dan Sekitarnya Provinsi Kalimantan Timur*, [www.kemenpar.go.id > asset\\_admin > assets > uploads > media > pdf](http://www.kemenpar.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/pdf), diakses 6 April 2020.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Dit. Perencanaan Ruang Laut Lakukan Persiapan Pemantauan Pendataan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut*, <https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/9779-dit-perencanaan-ruang-laut-lakukan-persiapan-pemantauan-dan-pendataan-perizinan-pemanfaatan-ruang-laut>, diakses 5 April 2020.

Pemerintah Kabupaten Berau, *Pariwisata*, [http://beraukab.go.id/v2/?page\\_id=5658](http://beraukab.go.id/v2/?page_id=5658), diakses 4 November 2019.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, *Pulau Derawan Jadi Pusat Industri Pariwisata Kaltim*, <https://kaltimprov.go.id/berita/pulau-derawan-jadi-pusat-industri-pariwisata-kaltim>, diakses 4 November 2019

*The Law Dictionary*, [thelawdictionary.org/building](http://thelawdictionary.org/building), diakses 17 Maret 2020.

Tribunnews.com, *Penginapan dan Resort Menjorok ke Pantai Kian Marak, Mayoritas Tak Punya IMB*, <https://kaltim.tribunnews.com/2016/07/25/penginapan-dan-resort-menjorok-ke-pantai-kian-marak-mayoritas-tak-punya-imb>, diakses 11 September 2019.

Wikipedia, *Indonesia*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#cite\\_note-merdeka-11](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#cite_note-merdeka-11), diakses 11 September 2019.